

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagai negara dengan banyak penduduk yang tinggal di berbagai pulau, Indonesia pasti memiliki karakteristik yang berbeda di setiap wilayahnya. Setiap wilayah atau daerah di Indonesia dapat mencapai tingkat kesejahteraan yang memungkinkan masyarakat untuk menjalani kehidupan yang layak. Dalam hal kesejahteraan masyarakat pemerintah telah berupaya membangun kesejahteraan masyarakat yang dasarnya mengarah pada tujuan dalam isi sila pancasila yang kelima yaitu lebih menekankan pada prinsip keadilan sosial serta tegas konstitusinya pada pasal 27 dan 34 UUD 1945 yang mengamankan tanggungjawab pemerintah dalam pembangunan kesejahteraan masyarakat. Kenyataannya keadaan ketika era orde baru ataupun di era reformasi saat ini, amanat konstitusi tersebut belum sepenuhnya diterapkan. Karena adanya hambatan dalam penanganan pembangunan, upaya pembangunan kesejahteraan bagi masyarakat masih dinilai secara slogan atau retorika serta belum dapat terintegrasi kedalam strategi pembangunan ekonomi (Rahman, 2018).

Pembangunan di suatu daerah atau wilayah dapat menjadi salah satu perubahan sosial yang pasti terjadi dalam masyarakat, kesempatan ini dapat menjadi pendukung untuk meningkatkan kesejahteraan perekonomian di masyarakat setempat terlaksana seiring dengan segala tindakan positif hingga negatif dari pembangunan tersebut. Hal tersebut menjadi bukti bahwa pembangunan tidak hanya akan memberikan keuntungan bagi ekonomi yang

terlibat, namun juga dapat memunculkan perubahan sosial serta budaya bagi masyarakat itu sendiri, mulai dari pola hidup hingga sosial yang harus dihadapi. Peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat didukung dengan rangkaian usaha yang salah satu didalamnya seperti dilakukannya pembangunan secara berangsur dan konsisten yang mana selalu melibatkan masyarakat sebagai objek serta subjeknya(Mohamad, 2015).

Kesejahteraan masyarakat selama ini dinilai identik dari mengukur tingginya Produk Domestik Bruto(PDB) milik suatu negara pada tahun tertentu. Apabila nilai PDB milik suatu negara semakin tinggi maka tingkat produktifitasnya akan semakin tinggi tinggi pula, selanjutnya tentu akan dibarengi dengan peningkatan kesejahteraan oleh masyarakat. Menurut dari data BPS yang dikutip dari Bank Indonesia.

“...Sementara secara spasial, pertumbuhan ekonomi triwulan II 2023 yang tinggi tercatat di sebagian besar wilayah Indonesia. Pertumbuhan ekonomi tertinggi tercatat di wilayah Sulawesi-Maluku-Papua (Sulampua), diikuti Kalimantan, Jawa, Sumatera, dan Bali-Nusa Tenggara (Balinusra).”
Sumber:https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruangmedia/newsrelease/Pages/sp_2521523.aspx (diakses pada tanggal 24 September 2023)

Dari berita yang ditulis oleh pihak Bank Indonesia sendiri, menandakan bahwa perekonomian di Indonesia mulai mengalami peningkatan. Sehingga dapat dikatakan kesejahteraan masyarakat Indonesia mulai meningkat pula.

Selain meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang ada di Indonesia, penurunan ekstrem pada tingkat kemiskinan di Indonesia menjadi salah satu hal positif menandakan semakin meningkatnya taraf kesejahteraan masyarakat di Indonesia.

“.....Menurut BPS, Posisi angka kemiskinan ekstrem per Maret 2022 adalah 2,04% dan menurun di September 2023 menjadi 1,74%. Terbaru, seiring dengan rilis BPS angka kemiskinan Maret 2023 terus menurun baik di perdesaan maupun perkotaan, sehingga optimis target penurunan angka kemiskinan ekstrem nol persen pada 2024 dapat tercapai”.Sumber: <https://www.kemenkopmk.go.id/angka-kemiskinan-ekstrem-2023-turun-112> (diakses pada tanggal 24 September 2023)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 yang menjelaskan mengenai Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang tercantum pada pasal 126 yang menjelaskan bahwa desa merupakan payung hukum pada pelaksanaan suatu pemberdayaan masyarakat desa, yang memiliki tujuan agar desa dapat berkerjasama serta bersatu melaksanakan tanggungjawab dalam segi tata kelola lembaga pemerintahan desa, tata ekonomi dan lingkungan hingga tata kelola lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat. Selanjutnya dalam ayat 1 juga disebutkan mengenai pemberdayaan masyarakat desa tentang Pemerintah juga secara khusus memperhatikan pemberdayaan masyarakat dan pemihakan melalui pengembangan pembangunan ekonomi (Nardin, 2019).

Margono Slamet (2000) dalam (Utami, 2019) berpendapat bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan pernyataan dari tujuan pengarah pembangunan. Tujuan tersebut berkaitan dengan bagaimana usaha dalam peningkatan kualitas dari sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki, khususnya pada pembentukan dan perubahan kondisi masyarakat dalam meningkatkan

kualitas dari taraf hidupnya. Makna dari pemberdayaan apabila dalam pelaksanaannya pada kehidupan sehari-hari adalah sebuah dorongan atau semangat serta bimbingan atau petunjuk dalam peningkatan kemampuan masyarakat baik untuk masing-masing individu ataupun secara kelompok agar mandiri. Usaha tersebut merupakan suatu tahap dari sebuah proses pemberdayaan berupa perubahan perbuatan, perubahan rutinitas lama menjadi perbuatan baru yang lebih baik untuk meningkatkan nilai serta kesejahteraannya (Margayaningsih, 2018).

Dijelaskan oleh Mardikanto & Soebiato dalam (Subiato, 2012) bahwa terdapat empat hal pokok yang perlu diperhatikan dalam upaya pemberdayaan yakni: Pertama mengenai bina manusia yang berarti diadakannya kegiatan atau aktivitas untuk meningkatkan, memberdayakan serta mendampingi keterampilan bagi sumber daya manusia setiap individu ataupun secara kelompok. Kedua mengenai bina usaha yang berarti diadakannya kegiatan untuk mendorong pengarahannya dalam memperbaiki kesejahteraan setiap masyarakat supaya digunakan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat. Ketiga mengenai bina lingkungan dapat diartikan bahwa ketika diadakannya kegiatan oleh masyarakat tidak dapat terpisah dari lingkungan sekitar berbentuk interaksi antara makhluk sosial bersama dengan lingkungan sosial agar dapat mempengaruhi pada kehidupannya secara terus menerus. Keempat mengenai bina kelembagaan diartikan ketika suatu kelompok ataupun organisasi yang mempunyai hubungan sosial yang luas dapat digunakan sebagai pengembangan keahlian serta membuat masyarakat mandiri maupun meningkatkan pengetahuan yang didapatkan.

Kesejahteraan masyarakat tidak hanya dilihat dari makin pesatnya pertumbuhan di kota melainkan pertumbuhan perekonomian dan kesejahteraan di desa juga perlu diperhatikan. Untuk mengupayakan kesejahteraan masyarakat desa fokus pemerintah juga perlu diarahkan pada pemberdayaan masyarakat desa karena di Indonesia sendiri sebagian masyarakat masih tinggal di desa. Kesejahteraan masyarakat desa juga dapat diraih oleh pemerintah melalui upaya pembangunan fasilitas dan infrastruktur serta memberikan pelatihan dan pemenuhan kebutuhan terhadap proses pembangunan dan peningkatan ekonomi desa melalui BUMDes. Dengan berdirinya suatu BUMDes dengan harapan dapat mengorganisir usaha yang telah dimiliki dan dikembangkan oleh masyarakat di desa bertujuan untuk meningkatkan hingga menambahkan penghasilan bagi masyarakat yang ada di desa (Maulana et al., 2021).

Saat ini, kebanyakan desa yang ada di Indonesia belum mencapai potensi terbaik mereka. Potensi desa terdiri dari sumber daya alam sampai sumber daya manusia milik desa, keduanya merupakan modal dasar yang harus dikelola serta dikembangkan untuk memastikan keberlangsungan hidup dan kemajuan desa. Tergantung pada lokasi geografis, populasi, dan demografi, potensi desa berbeda-beda di seluruh negara, luas tanah, dan tingkat kesuburan tanah. Selain itu, faktor sumber daya manusia dari laki-laki maupun perempuan baik usia muda ataupun dewasa menjadi faktor pengelolaan dan pengembangan keterampilan yang belum maksimal dalam pelaksanaannya (Rizal et al., 2020).

Melalui Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengenai Pemerintahan Daerah, dalam pelaksanaannya pemerintah daerah diberikan kewenangan lebih oleh

pemerintah pusat untuk dapat mengurus urusan daerahnya sendiri dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan pemerintah tidak terlepas dari usaha mewujudkan hal tersebut, karena peran dari pemerintah dalam pembangunan masyarakat merupakan hal penting bahkan menjadi tolak ukur untuk keberhasilan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Upaya dalam mendukung pemerintah serta pembangunan umum dilakukan dengan dibentuknya pemegang tanggung jawab atas pemberdayaan masyarakat desa seperti adanya Pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa, forum musyawarah desa, lembaga kemasyarakatan desa, lembaga adat desa, BUMDes, Badan Kerja Sama Antar Desa, Forum Kerjasama Desa, serta kelompok kegiatan masyarakat lainnya (Nardin, 2019).

Terdapat rencana yang lahir agar desa mampu menghasilkan sumber pendapatan desa mulai dari pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES). Dalam dibentuknya BUMDES tersebut maka perlu adanya pengambilan serta pemanfaatan potensi yang dimiliki desa baik dari Sumber daya alam (SDA) ataupun sumber daya manusia (SDM) supaya keberadaan BUMDES mampu berfungsi serta berjalan dengan baik. Rencana atau usaha BUMDES juga memiliki keharusan untuk terus dijalankan secara terus menerus (Christyana & Mutmainah, 2023).

Pada Undang- Undang Nomor 20 pada Tahun 2008 mengenai Usaha Mikro, Kecil hingga Menengah yaitu pasal 1 ayat (8) dijabarkan bahwa pemberdayaan merupakan upaya yang dilakukan oleh pemerintah, dunia usaha serta masyarakat dalam bentuk penumbuhan iklim usaha pembinaan dan pengembangan sehingga usaha kecil menengah mampu menumbuhkan dan memperkuat dirinya menjadi

usaha yang tangguh serta mandiri (Andriyanti et al., 2023). Peran UMKM memiliki makna yang penting bagi suatu daerah untuk dijadikan sebagai contoh atau penggerak laju pertumbuhan ekonomi daerah tersebut. Kegiatan UMKM yang ada merupakan salah satu cara agar kegiatan produksi masyarakat setempat bergerak dan menghasilkan suatu karya baik berupa barang atau produk makanan yang nantinya dapat dikenal serta dapat memberikan dampak positif dan peluang yang baik bagi pelaku usaha di daerah tersebut.

Selain itu, dampak positif yang ditimbulkan dari adanya UMKM, para pengusaha bisnis dapat dilihat ketika keduanya menjadi salah satu faktor menumbuhkan penghasilan perkapita ataupun penghasilan ekonomi pada suatu daerah (Dwijanto, 2023). Adanya UMKM menjadi salah satu dari berbagai faktor yang mempengaruhi naik atau turunnya pertumbuhan ekonomi yang ada di Indonesia. Apabila dilihat dalam UUD 1945 pasal 33 ayat 4, pengertian UMKM merupakan bagian dari perekonomian nasional dengan wawasan kemandirian dan memiliki potensi besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Keberadaan UMKM dapat menjadi langkah dalam menjalankan perekonomian karena usahanya yang meliputi berbagai aspek dan lapangan usaha. Saat ini telah berlaku otonomi desa, sehingga desa mempunyai hak dan kewenangan penuh dalam pengelolaan pemerintahnya sendiri bahkan dalam hal pendapatan.

Pertumbuhan jumlah UMKM yang semakin meningkat dari tahun ke tahun belum dapat diimbangi dengan perkembangan kualitas UMKM yang masih kesulitan dalam permasalahan sederhana yakni rendahnya kemampuan dalam mempertahankan usaha yang sedang dijalani. Dalam upaya yang dilakukan UMKM

dirasa harus lebih meningkatkan daya saing serta kualitas produk yang dijual agar dapat mempertahankan atau memperkenalkan produk-produk unggulan yang dihasilkan untuk mengambil peluang daya saing dalam dunia bisnis (Andriyanti et al., 2023).

Sidoarjo merupakan salah satu kabupaten di Jawa Timur yang memiliki ciri khas yang terkenal dengan sebutan kota udang dan bandeng bahkan dijuluki juga sebagai kota Delta. Tentu saja julukan ini diberikan karena banyaknya tambak atau perairan sungai yang dijadikan sebagai budidaya udang dan bandeng untuk menambah penghasilan masyarakat Sidoarjo. jumlah kecamatan yang ada di Sidoarjo ada 18 kecamatan, 31 kelurahan dan 322 desa.

Tabel 1.1 Data Kecamatan di Sidoarjo

No.	Kecamatan
1	Sidoarjo
2	Candi
3	Buduran
4	Porong
5	Krembung
6	Tulangan
7	Tanggulangin
8	Jabon
9	Krian
10	Balongbendo
11	Tarik
12	Prambon
13	Wonoayu
14	Taman
15	<i>Tabel 1.1 data kecamatan di Sidoarjo</i>
16	Gedangan
17	Waru
18	Sedati
Jumlah	18 Kecamatan

Google(<https://www.tagana.id/p/kabupaten-sidoarjo-peta-sidoarjo.html>) diakses tanggal 04 September 2023

Pada tahun 2022 Sidoarjo mengadakan perlombaan yang melibatkan masyarakat Sidoarjo sendiri dengan harapan dapat membangkitkan kembali perekonomian masyarakat Sidoarjo. Mengutip (dari tvonenews.com, diakses 04 September 2023) pada tahun yang sama yakni 2022 Sidoarjo mengadakan sebuah perlombaan dimana dalam lomba tersebut terdapat 2 kategori dalam tema desa wisata. 2 kategori tersebut tidak jauh dari hal yang berkaitan dengan air atau perairan. Dalam lomba tersebut 2 kategori yang diberikan yakni desa sungai bersih yang diikuti sebanyak 6 desa dan kategori desa sidoresik yang diikuti 8 desa 14 desa tersebut sebelumnya melalui tahap seleksi terlebih dahulu.

Desa Kedungwonokerto merupakan salah satu desa di Sidoarjo tepatnya terletak di kecamatan Prambon perbatasan Kab. Mojokerto. Pada tahun 2022 Desa Kedungwonokerto dinobatkan menjadi salah satu peraih kategori sidoresik se kabupaten dengan memperlihatkan kebersihan sungai dan memanfaatkan potensi-potensi lingkungan sekitar yang tentunya hasil dari partisipasi masyarakat.

Poin penilaian yang dilombakan diantaranya keindahan dan kebersihan desa terutama disekitaran area kali(sungai). Selain itu stan UMKM yang berjualan disepanjang area kali(sungai) juga menjadi poin tambahan sebagai penilaian saat lomba. Lomba Tersebut selain mengajak masyarakat Sidoarjo menjaga kebersihan dan keindahan sungai juga menjadi salah satu semangat serta membuat bangkitnya nilai ekonomi bagi masyarakat desa melalui kreatifitas masyarakat dalam mengelola sungai agar memiliki nilai ekonomis yang nantinya dapat digunakan untuk tempat berjualan.

“...Sedangkan delapan desa yang masuk kategori Sidoresik, yakni Desa Ketapang, Tanggulangin, Desa Kedungwonokerto, Prambon, Desa

Cangkring, Krembung, Desa Tebel, Gedangan, Desa Sidorejo, Krian, Desa Kedungpeluk, Candi, Desa Kebonanom, Gedangan, dan Desa Candinegoro, Wonoayu". Sumber: <https://tvnonenews.com/daerah/jatim/2537-asyik-sidoarjo-kini-punya-belasan-des-destinasi-baru-wisata-des> (Diakses pada tanggal 04 September 2023)

Dari berita diatas, tentunya sudah mulai adanya perubahan serta perkembangan terhadap beberapa desa yang ada di Sidoarjo yang salah satunya desa Kedungwonokerto. Desa Kedungwonokerto mendapat juara harapan 3 dalam perlombaan dengan kategori sidoresik tentunya tidak jauh dari campur tangan masyarakat desa Kedungwonokerto sendiri. Selain itu, tempat UMKM kuliner yang ada di desa tersebut juga menjadi salah satu keunggulan yang dimiliki karena tempat yang bersih, rapi dan nyaman membuat banyak pengunjung berdatangan ke UMKM kuliner.

"....."Poin penilaian dalam lomba ini selain kebersihan dan keindahan, ditambah adanya stan UMKM di sepanjang area kali. Karena output dari program Sidoresik merevitalisasi kali menjadi wisata baru, atau wisata desa yang bisa mendorong peningkatan ekonomi warga yang ada di desa itu."....." Ning Sa'adah melihat, ada potensi ekonomi atau peluang usaha di area kali yang sudah direvitalisasi dengan dipercantik itu. "...". Melalui program Sidoresik ini, Sa'adah berharap akan muncul puluhan wisata desa baru yang nantinya bisa dikelola sendiri oleh warga sekitar atau dikelola lewat pemerintah desa". Sumber : <https://www.tvonenews.com/daerah/jatim/25237-asyik-sidoarjo-kini-punya-belasan-destinasi-baru-wisata-des>. (Diakses pada tanggal 04 September 2023).

Tentunya anugerah tersebut menjadi awal serta motivasi dari hasil kerja keras seluruh masyarakat dan pemerintah desa di desa Kedungwonokerto. Penampilan atau letak UMKM kuliner yang sudah mulai tertata dengan rapi serta memiliki tempat yang bersih dan nyaman menjadi salah nilai tambah.

Berdasarkan pengamatan di sekitar area desa Kedungwonokerto bahwa BUMDes yang mulai dibangun pada tahun 2020 ini mulai mengembangkan

beberbagai kegiatan-kegiatan yang berguna untuk menyejahterakan dan memberdayakan masyarakat desa. Berbagai kegiatan yang telah dilakukan berupa pelatihan bagi pengusaha UMKM yang bekerjasama dengan pihak perusahaan agar para pengusaha UMKM memiliki inovasi atau inspirasi yang relevan dalam mengelola bisnis para pengusaha UMKM tersebut. Selain itu kegiatan bazar UMKM se kecamatan yang diselenggarakan oleh pihak BUMDes. Untuk memfasilitasi dan mengembangkan usaha yang dimiliki masyarakat desa, pihak BUMDes membuat sebuah *website* yang berisi tentang kegiatan dan penjualan produk-produk pengusaha UMKM agar lebih dikenal masyarakat luas. Selain itu, BUMDes di Desa Kedungwonokerto saat ini lebih banyak memberikan bentuk upaya memberdayaan dibidang jasa seperti membantu mempromosikan penjualan UMKM melalui *website* yang dibuat secara khusus oleh pihak BUMDes serta menyediakan atau menyewakan tempat milik BUMDes untuk digunakan masyarakat yang ingin mendirikan usaha.

Pada program UMKM milik BUMDes di daerah Kedungwonokerto yang diketahui masih baru diadakan namun sudah banyak terdapat pelaku usaha yang mulai meramaikan area tersebut bahkan sebelum didirikannya BUMDes. UMKM sebagai wadah bagi masyarakat desa yang hendak memulai usaha yang mereka inginkan dibidang kuliner. Salah satu kegiatan ekonomi yang berjalan hingga saat ini adalah sentra kuliner di desa Kedungwonokerto, walaupun sempat terjadi penurunan omset bahkan penutupan tidak membuat masyarakat putus asa karena adanya peran serta pemerintah desa melalui BUMDes yang ikut serta membantu. Disamping UMKM kuliner di desa KedungWonokerto mulai terbentuk dari

BUMDes, tempat kuliner sudah ramai dan dikenal oleh pengunjung bahkan pelanggan yang berdatangan tidak hanya dari satu desa melainkan orang-orang luar desa maupun kota ingin singgah dan menikmati makanan yang tersedia di sentra UMKM kuliner.

Kerjasama yang tercipta antara pemerintah desa dengan masyarakat setempat juga menjadi salah satu poin penting dimana keselarasan yang menjadi tujuan bersama diantara keduanya untuk memajukan, menyejahterakan serta memberdayakan masyarakat desa dapat tercapai dengan lancar dan terus berjalan. Beberapa hasil dari kerjasama tersebut dapat dilihat dari dibangunnya tempat sentra kuliner baru yakni “Kerto Emas”. Dibangunnya sentra kuliner yang diberi nama “Kerto Emas” dengan harapan dapat membangkitkan serta memberdayakan masyarakat desa. Selain itu, adanya sentra kuliner milik BUMDes mampu memberikan harapan baru bagi masyarakat yang menggantungkan hidupnya dengan berdagang.

Sebagaimana pada uraian diatas, penulis tertarik mengambil tentang bagaimana pemberdayaan UMKM melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Kedungwonokerto Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo. Terdapat empat hal pokok yang dijelaskan Mardikanto dan Subiato dalam buku (Subiato, 2012) bahwa Bina manusia yang dilakukan BUMDes dalam menyelenggarakan kegiatan pendampingan serta pelatihan guna meningkatkan kreativitas masyarakat desa. Kedua, bina usaha yang dilakukan BUMDes melalui pembuatan sebuah *wesbite* yang berisikan beberapa kegiatan serta produk-produk hasil dari masyarakat desa. Ketiga, bina lingkungan yang dilakukan BUMDes memberikan tempat atau

wadah bagi masyarakat yang memiliki usaha agar dapat semakin mengembangkan usahanya. Keempat, bina kelembagaan yang dijalankan BUMDes telah melakukan kerjasama baik pihak pemerintah maupun swasta dalam pengelolaan kegiatan misalnya dalam kegiatan bazar UMKM, pelatihan dan pembinaan pengusaha UMKM dengan perusahaan swasta.

Sesuai dengan teori penjelasan diatas, pada kegiatan-kegiatan yang telah diadakan dan dilaksanakan BUMDes memiliki beberapa kendala serta belum dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat UMKM yang ada di desa Kedungwonokerto. Pada Bina Manusia terdapat kegiatan-kegiatan yang seperti pelatihan dan sosialisasi yang berjalan belum mendapat hasil yang maksimal karena terkendala waktu yang tidak teratur sehingga tidak adanya jadwal yang pasti dalam kegiatan sosialisasi dan pelatihan tersebut. Hal itu diperkuat dengan beberapa informasi yang didapat peneliti melalui wawancara pendahuluan sebagai berikut :

Dari informasi yang didapat dari pegawai BUMDes tentang kendala yang dihadapi :

“Waktu untuk pelatihan serta sosialisasi untuk para UMKM belum terjadwal dengan teratur dan cenderung mendadak. Selain itu, dalam kegiatan tersebut belum mencukupi waktu yang relevan dengan para pihak dari UMKM”.

Selain itu, pada Bina usaha juga terdapat kendala lain yang menjadikan program atau kegiatan yang dibentuk BUMDes tidak berjalan maksimal adalah penggunaan *website* yang tersedia. Kendala tersebut berupa akses *website* yang sempat tutup karena situs *website* yang tidak permanen serta masih kurang minatnya masyarakat terutama para pelaku UMKM dalam mengakses serta

menggunakan *website* tersebut. Hal itu diperkuat dengan beberapa informasi yang didapat peneliti melalui wawancara pendahuluan sebagai berikut :

Dari informasi yang didapat dari pegawai BUMDes tentang kendala yang dihadapi :

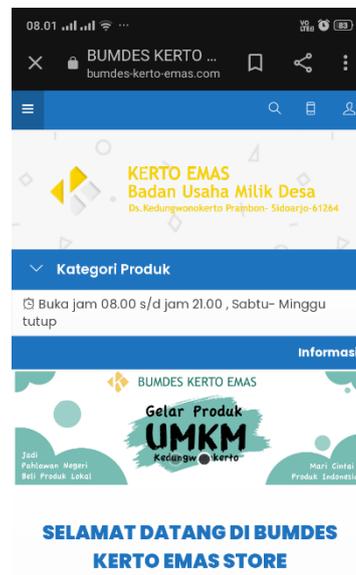
“Masih kurangnya warga yang menggunakan *website* serta situs *website* yang belum tetap sehingga warga kesulitan mengakses di *website* BUMDes. Serta saat ini masih kurangnya sosialisasi tentang penggunaan situs *website*”

Selain dari beberapa kendala yang ada, pada Bina Lingkungan juga terdapat beberapa kendala salah satunya untuk tempat yang disediakan juga dirasa kurang maksimal karena lahan yang ada belum mencukup untuk warga yang berjualan dan hanya mampu menampung beberapa penjual saja. Hal itu diperkuat dengan beberapa informasi yang didapat peneliti melalui wawancara pendahuluan sebagai berikut :

Dari informasi yang didapat dari pegawai BUMDes tentang kendala yang dihadapi :

“Untuk tempat berjualan yang disediakan oleh pihak BUMDes masih belum mencukup untuk para UMKM yang berjualan di area tersebut ”

Selain itu terlepas dari berbagai inisiatif yang telah dilakukan BUMDes untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat, kelompok ini juga telah membuat situs web yang menampilkan produk-produk yang ditawarkan untuk dijual secara online. Beberapa produk yang dijual diantaranya produk makanan dan minuman baik bernuansa kekinian maupun tradisional, pabrik pembuatan kardus sepatu.



Gambar 1.1 Website BUMDes

Sumber : *wesbite resmi* BUMDes <https://bumdes-kerto-emas.com/> (diakses 19 Desember 2023)

Pada *wesbite* kerto emas milik BUMDes terdapat beberapa pilihan produk makanan dan minuman yang dijual secara online. Produk-produk tersebut tidak hanya makanan modern atau kekinian melainkan juga menjual makanan tradisional. Selain itu, pada minuman yang dijual terdapat keunikan yakni perpaduan minuman kesehatan dengan buah seperti sinom belimbing wuluh yang dijual pada *wesbite* BUMDes kerto emas. Selain menjual produk makanan dan minuman, di *wesbite* kerto emas.

Apabila melihat dari latar belakang serta penjabaran dari penelitian pendahuluan maka peneliti menemukan bahwasanya peran pemerintah dapat memberi dukungan serta bantuan untuk masyarakat desa melalui dibentuknya

BUMDes. Selain itu, pemberdayaan masyarakat dalam bentuk peningkatan kesejahteraan serta ekonomi masyarakat terutama di lingkungan pedesaan dapat dilakukan melalui pembentukan sentra kuliner hingga pengolahan produk buatan warga yang dilakukan oleh BUMDes setempat. Untuk itu perlu dilakukan penelitian lebih mendalam terkait pemberdayaan masyarakat dalam membantu meningkatkan perekonomian serta kesejahteraan masyarakat desa KedungWonokerto. Atas dasar tersebut penulis mengambil judul penelitian **“Pemberdayaan Umkm Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Di Desa Kedungwonokerto Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo”**.

1.2 Rumusan masalah

Melalui penjabaran latar belakang serta data-data yang ditemukan dilapangan sebelumnya maka rumusan masalah yang hendak dijawab pada penelitian ini adalah bagaimana Pemberdayaan UMKM Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Di Desa Kedungwonokerto Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo?

1.3 Tujuan Penelitian

Apabila mengacu pada rumusan masalah yang dijabarkan sebelumnya, maka tujuan yang dipilih oleh peneliti adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis Pemberdayaan UMKM Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Di Desa Kedungwonokerto Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo.

1.4 Manfaat Penelitian

a. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan serta pengalaman dalam menganalisis suatu masalah berdasarkan penerapan teori yang telah didapatkan dari berbagai sumber literatur dan bangku perkuliahan yang telah ditempuh oleh penulis pada jurusan Administrasi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UPN “Veteran” Jawa Timur, serta membandingkan dengan keadaan yang terjadi dilapangan.

b. Bagi Universitas Pembangunan Nasional “Veteran “ Jawa Timur

Penelitian ini diharapkan dapat menambah sumber referensi atau bahan kajian yang ada pada perpustakaan sehingga dapat membantu penulis atau peneliti selanjutnya guna sebagai dasar ide untuk adanya penelitian yang sejenis di masa mendatang.

c. Bagi Pemerintahan desa Kedungwonokerto, Sidoarjo

Dapat digunakan menjadi bahan diskusi berkelanjutan tentang bagaimana pemberdayaan masyarakat dapat terus bermanfaat bagi masyarakat desa maupun pemerintah desa sehingga dengan adanya pemerdayaan masyarakat yang baik dapat meningkatkan perekonomian masyarakat desa.